

## Perbandingan Antara Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah Otonomi Baru dan Daerah Induk di Indonesia Pasca Pemekaran

Friska Cahya Yumanda<sup>1</sup> & Adhinda Rachma Aminy<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta<sup>1</sup> & Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember<sup>2</sup>

Diterima: 17 Maret 2022 | Revisi: 21 April 2022 | Diterbitkan: 29 Januari 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perkembangan kinerja ekonomi antara daerah induk dan daerah otonomi baru pasca pemekaran. Sampel penelitian terdiri dari 27 daerah meliputi 14 daerah otonomi baru (DOB) dan 13 daerah induk (DI) yang merupakan daerah-daerah terdampak dari pemekaran yang dilakukan selama periode tahun 2012 dan 2013. Sampel penelitian menggunakan data tahun 2014-2018 yang merupakan data lima tahun pertama yang tersedia pasca pemekaran. Metode penelitian menggunakan uji non parametrik mann-whitney test dengan cara membandingkan nilai mean rank antara kelompok DOB dan DI pertahunnya melalui uji t. Hasilnya, diketahui bahwa daerah otonomi baru mengalami perkembangan tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah, dan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Namun di sisi lain, pertumbuhan PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan pada daerah otonomi baru menunjukkan kinerja yang lebih buruk dibandingkan daerah induk.

Kata Kunci: Ekonomi regional, daerah otonomi baru, daerah induk & pemekaran wilayah

### Comparison between the development of economic performance of new autonomous regions and parent regions in Indonesia after expansion

### ABSTRACT

This study aims to compare the development of economic performance between the parent region and the new autonomous regions after the division. The research sample consists of 27 regions, including 14 new autonomous regions (DOB) and 13 parent regions (DI) which are affected areas from the expansion carried out during the period 2012 and 2013. The research sample uses data from 2014-2018, which is data from the first five year available after the expansion. The research uses the non-parametric Mann-Whitney test by comparing the mean rank values between the DOB and DI groups annually through the t-test. As a result, it is known that the new autonomous regions have developed a level of regional financial capacity, a level of regional independence, and a level of dependence on transfer funds that are better than the parent region. On the other hand, the growth of GRDP per capita and the poverty rate in the new autonomous regions show worse performance than the parent regions.

Keywords: Regional economy, new autonomous region, parent region & regional expansion

### How to Cite:

Yumanda, F. C. ., & Aminy, A. R. . (2023). Perbandingan Antara Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah Otonomi Baru dan Daerah Induk di Indonesia Pasca Pemekaran. JDEP, 6(1), 23-41. <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i2.408>

### \*Corresponding Author:

Email : [dhinda.ara@gmail.com](mailto:dhinda.ara@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember



This article is published under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar agar dapat mengelola sendiri daerahnya karena adanya peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan yang bertanggung jawab kepada daerah. Peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintah daerah tercantum pada UU Nomor 22 tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat banyak daerah otonom baru yang telah dibentuk pemerintah. Usulan mengenai daerah otonom baru masih terus dibahas hingga saat ini.

Tujuan dari pemekaran daerah dengan membentuk daerah otonomi baru adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, dengan adanya pembentukan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara keunikan tradisi, adat istiadat, dan budaya daerah. Selain pemekaran daerah, ada opsi lain untuk membentuk pemerintah baru yaitu dengan melakukan amalgamasi. Amalgamasi adalah penggabungan dua atau lebih pemerintah daerah menjadi satu (Belley, 2012).

Di paruh kedua abad ke-20 ini, amalgamasi menjadi tren di dunia untuk mewujudkan birokrasi yang terintegrasi seperti yang dilakukan oleh Kanada, Jepang, Australia, Israel, dan beberapa negara di Eropa Barat (Tavares, 2018). Amalgamasi dinilai memberikan dampak pada efisiensi ekonomi, efektivitas manajerial, dan demokratisasi. Saat tren dunia adalah melakukan amalgamasi, Indonesia cenderung melakukan pemekaran daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah yang memiliki cakupan wilayah yang lebih sempit dapat lebih fokus untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu, pemekaran daerah menjadi opsi yang menarik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki 223 DOB (Daerah Otonomi Baru) yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota (Sekretaris Kabinet, 2020). Meskipun ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun nyatanya pembentukan DOB belum mampu untuk mendukung tujuan tersebut. Penelitian oleh (Maulana, 2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan DOB cenderung konstan sehingga memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi. Pemekaran daerah menjadi alasan untuk menciptakan pemerataan pembangunan namun pada kenyataannya penyelenggaraan DOB tidak efektif dan menjadi beban untuk negara.

Halim (2011) dalam Fitra (2014) menjelaskan bahwa daerah yang dapat melaksanakan otonomi daerah memiliki ciri utama yaitu memiliki kewenangan dalam menggali sumber keuangan, menggunakan dan mengelola keuangan tersebut untuk kegiatan pemerintahan, dan memiliki ketergantungan terhadap dana transfer seminim mungkin. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah melakukan belanja daerah dimana dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila PAD yang dihasilkan masih rendah, maka kekurangan pembiayaan tersebut bersumber dari transfer pemerintah pusat melalui DAU, DBH, dan DAK. Kemampuan daerah yang rendah dalam menggali potensi

sumber daya akan menyebabkan PAD yang didapat juga rendah sehingga daerah akan bergantung pada dana transfer.

Apabila dilihat dari kinerja ekonomi daerah, DOB menunjukkan kinerja yang kurang optimal dari daerah induk yang dapat dilihat dari tingkat ketergantungan fiskal. Penelitian oleh (Fitra, 2014) menyimpulkan bahwa tingkat rasio kemandirian keuangan daerah baik induk maupun daerah pemekaran memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi. Penelitian oleh (Triakurniasih et al., 2019) yang meneliti dampak pemekaran daerah di Provinsi Jambi juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan DOB lebih tinggi dari daerah induk. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, daerah induk termasuk stabil daripada DOB yang fluktuatif. Seperti yang diteliti oleh (Sulasmis & Siregar, 2020) yang meneliti pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran dan daerah induk di Provinsi Aceh dengan mengklasifikasikan daerah melalui Tipologi Klassen menunjukkan bahwa mayoritas Kuadran IV terdiri dari daerah pemekaran. Hal ini menjelaskan bahwa pemekaran yang telah dilakukan masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa persoalan utama yang sering dihadapi oleh daerah otonomi baru pasca pemekaran ialah terjadinya kesulitan keuangan dalam membiayai pembangunan. Pemekaran daerah yang pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi lokal, di satu sisi dapat membuka kesempatan yang luas bagi daerah otonomi baru tersebut melakukan percepatan pembangunan ekonomi di wilayahnya. Sebab, daerah pemekaran kemudian memiliki status sebagai daerah otonom dan dapat lebih leluasa dalam membangun bukan hanya infrastrukturnya sendiri, melainkan juga infrastruktur fisik dan pelayanan publik yang menyertainya. Akselerasi pembangunan tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar bagi DOB agar meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Akan tetapi, percepatan pembangunan tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak murah. Terlebih dengan terbentuknya pemerintahan yang baru, anggaran untuk membiayai pemerintahan daerah seperti dalam belanja operasional pemerintahan maupun hal belanja pegawai akan mengalami perubahan sehingga perlu adanya penyesuaian (Sutojo, 2015).

Sebagaimana telah dijelaskan hasil penelitian sebelumnya, DOB memiliki kecenderungan mengalami penurunan pendapatan dan kemampuan keuangan daerah dibandingkan daerah induknya. Dalam jangka pendek, struktur penerimaan pada DOB tidak akan jauh berbeda dengan daerah induk. Sementara dengan wilayah baru DOB yang mengakibatkan wilayah kerja, wilayah potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia semakin terbatas, akan menjadi tantangan yang menyulitkan DOB dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada secara sepenuhnya menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut. Wilayah yang semakin terbatas juga menyebabkan semakin berkurangnya sumber-sumber pendapatan daerah pemekaran, terutama yang berasal dari sektor perpajakan (Pramidaya Haji, 2015). Terjadinya penurunan pendapatan dan kemampuan keuangan daerah pada DOB tidak sejalan dengan ongkos mahal yang harus dibayarkan DOB untuk mewujudkan cita-cita dilakukannya

akselerasi pembangunan. Sehingga dalam banyak kasus, daerah-daerah hasil pemekaran yang kapasitas fiskalnya belum memadai justru mengalami tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Maulana, 2020).

Sementara pada aspek perekonomian, hasil penelitian oleh BAPPENAS yang bekerja sama dengan UNDP (2008), menemukan bahwa daerah otonomi baru memiliki capaian PDRB perkapita yang lebih rendah dan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan daerah induknya. Hal tersebut karena keterbatasan infrastruktur penunjang pada DOB seperti jalan, infrastruktur pendidikan maupun prasarana ekonomi yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat miskin. Dengan infrastruktur pendidikan yang belum memadai, maka dalam kurun waktu yang singkat akan semakin sulit untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada DOB (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2008).

Permasalahan diatas tidak sejalan dengan tujuan dilakukannya pemekaran daerah, bahwa pemekaran daerah dapat menimbulkan persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan, sarana prasarana, pajak dan investasi kepada masyarakat sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Syarifuddin & Damayanti, 2015).

Fenomena penyimpangan antara teori dan realitas fenomena pemekaran di Indonesia seperti yang telah dijelaskan menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengungkap dampak pemekaran daerah terhadap aspek perekonomian berupa kemampuan keuangan daerah, kemiskinan, pendapatan dan belanja daerah, serta ketergantungan fiskal yang terjadi pada daerah otonomi baru dan daerah induk pasca pemekaran wilayah. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode uji dua sampel berpasangan untuk menjawab hipotesis yang diajukan mengenai perbandingan kondisi antara dua kelompok, yaitu kelompok daerah otonomi baru dan kelompok daerah induk. Kemudian, peneliti menggabungkan analisis deskriptif dari beberapa data kuantitatif sederhana yang tersedia di wilayah observasi untuk mendukung hasil dari uji statistik yang digunakan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah**

Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri sehingga dapat dilihat apakah desentralisasi telah berhasil dengan melihat pertumbuhan perekonomian suatu daerah melalui perhitungan PDRB per Kapita. Kemiskinan juga dapat menjadi indikator untuk melihat apakah kesejahteraan masyarakat dapat terwujud atas kinerja pemerintah daerah. Semakin rendah tingkat kemiskinan semakin baik pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi dipandang sebagai cara agar pemerintah pusat dalam memperoleh informasi yang lebih baik mengenai kondisi di daerah sehingga memungkinkan dibuatnya perencanaan program dan kebijakan yang lebih responsif dalam menyesuaikan permasalahan yang ada melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi dari masing-masing daerah. Desentralisasi juga memungkinkan pemerintah untuk dapat bereaksi lebih cepat terhadap masalah tak terduga yang mungkin muncul dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan (Harsasto, 2020).

Desentralisasi juga menjadi jalan dalam memenuhi tuntutan daerah-daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyesuaikan sifat, potensi, identitas, lokalitas, dan tujuan yang dimilikinya sendiri melalui pemerintahan yang mandiri dan didukung oleh peraturan perundang-undangan pemerintah daerahnya sendiri. Karenanya, desentralisasi merupakan bentuk perwujudan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah untuk mereduksi pemerintahan yang bersifat sentralistik atau terpusat.

Menurut Rondinelli (1981) penerapan desentralisasi dapat mendorong efisiensi waktu pelaksanaan dari suatu program dalam mencapai targetnya karena memungkinkan dilakukannya pemotongan jalur birokrasi melalui tingkatan pemerintah yang lebih rendah untuk menghindari berbagai prosedur atau regulasi rumit yang seringkali terjadi pada pemerintahan yang terlalu terpusat, atau tanpa adanya penerapan desentralisasi. Pemotongan jalur birokrasi yang dimaksud disini menekankan pada prinsip kesederhanaan dan kejelasan yang merupakan salah satu manfaat dari penerapan desentralisasi.

Rondinelli (1983) juga menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang dinilai telah memiliki mekanisme yang baik, ditandai dengan tujuan dan prosedur desentralisasi terhadap daerah-daerah yang sudah didefinisikan dengan jelas sehingga memungkinkan program-program yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan lancar dan efektif. Dalam pelaksanaannya, pejabat dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengawasi program dan kegiatan pada tingkat di bawahnya dalam memastikan pelaksanaan berjalan dengan efektif, namun tetap menyisakan ruang untuk mendorong inisiatif dan fleksibilitas dari setiap daerah.

Dalam konsep desentralisasi, terdapat istilah yang dikenal dengan "money follow function". Artinya, pada saat terjadi pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, akan diikuti pula oleh pembagian wewenang dalam hal pendanaan atau disebut juga sebagai desentralisasi fiskal (Kurniati, 2013).

Di Indonesia sendiri, penerapan desentralisasi fiskal bermula sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999. Lalu hampir dua dekade kemudian, setelah mengalami beberapa kali perubahan ditetapkan undang-undang terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menurut Kaho (1997) dalam Hastuti (2018), pada saat prinsip desentralisasi diterapkan oleh pemerintah pusat pada suatu daerah, maka secara bersamaan berarti diperolehnya otonomi bagi daerah tersebut. Adanya otonomi daerah membuat suatu daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan rumah tangganya sendiri. Untuk itu, kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan untuk mengurus dan mengatur otonominya sendiri menjadi aspek penilaian yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah. Artinya, faktor keuangan menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai seberapa baik kinerja suatu daerah dalam menjalankan dan mendanai kegiatan pemerintahannya (Aslym, 1999) dalam (Hastuti, 2018). Dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui perhitungan PDRB perkapita, dapat diketahui seberapa jauh keberhasilan penerapan desentralisasi pada daerah tersebut. Tingkat kemiskinan suatu daerah juga dapat menjadi indikator untuk melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat dapat terwujud atas kinerja pemerintah daerah. Semakin rendah tingkat kemiskinan, mencerminkan semakin baiknya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya terkait pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemekaran Daerah

Pembentukan daerah secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, berisi tentang pembagian daerah provinsi dan daerah yang lebih kecil. Pembentukan daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Dalam UU ini diatur bahwa pembentukan daerah dibentuk dengan beberapa pertimbangan yaitu kemampuan ekonomi suatu daerah, potensi, sosial budaya dan politik, luas dan jumlah penduduk, serta pertimbangan lain dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah ditujukan agar menumbuhkan kreativitas dan Prakarsa masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Adanya DOB yang dibentuk melalui pemekaran daerah yang bertujuan agar kesejahteraan masyarakat meningkat melalui pelayanan publik, pembangunan perekonomian daerah, dan pengelolaan potensi daerah yang lebih baik.

Dalam pasal 2 PP Nomor 129 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui percepatan: a) pelayanan publik; b) pengelolaan potensi daerah; c) pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah; d) keamanan dan ketertiban; dan e) pertumbuhan kehidupan demokrasi; dan e) hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pemekaran daerah menjadi salah satu opsi yang diminati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan pelayanan publik yang lebih baik akan terwujud jika pelayanan memiliki cakupan wilayah yang lebih terbatas untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu percepatan pertumbuhan ekonomi dapat lebih terarah dengan adanya daerah otonom baru yang lebih memahami kondisi daerahnya menggali potensi yang terlewat.

Melalui pemekaran daerah, kelompok masyarakat dengan sosial budaya yang serupa dapat memajemen konflik dengan lebih mudah. Jika ditinjau dari pelayanan

publik, pemekaran daerah akan memperpendek jarak geografis sehingga memungkinkan untuk membangun unit pelayanan publik untuk mendukung masyarakatnya. Namun, pemekaran daerah akan menyebabkan implikasi negatif terhadap kebutuhan biaya pemerintah pusat. Apalagi jika daerah pemekaran masih bergantung penuh terhadap dana transfer dalam hal pendapatan daerah (Amroni, 2019).

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana kerja pemerintah daerah yang dinilai secara kuantitatif dalam satuan moneter selama satu tahun anggaran disebut APBD (Haji 2015). APBD menggambarkan perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran daerah yang berupa pendapatan daerah dan belanja daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah baik secara fisik maupun non-fisik.

Penyusunan APBD bagi pemerintah daerah bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi masyarakat. APBD ditetapkan dalam peraturan daerah setelah dibahas dan disetujui DPRD.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

APBD adalah tolak ukur dalam melihat kemampuan keuangan suatu daerah. Bagaimana pemerintah daerah dalam membiayai setiap program kegiatan berdasarkan prinsip pemerataan dengan menggali potensi daerah dapat tercermin melalui APBD-nya (Sari, et all., 2021). Untuk mengetahui akuntabilitas perlu dilakukan pengukuran kinerja. Akuntabilitas bukan sekedar bagaimana kemampuan daerah dalam membelanjakan uang melainkan juga bagaimana daerah melakukan pembelanjaan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian pada kinerja pengelolaan keuangan daerah (Woestho, et all. 2020). Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat rasio indeks kemampuan rutin dan rasio derajat otonomi fiskal.

Derajat otonomi (DOF) didapat dengan membandingkan PAD dengan pendapatan total daerah. DOF menunjukkan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan. Kemampuan daerah tercermin dalam kontribusi PAD terhadap DOF, semakin tinggi maka semakin mampu suatu daerah menyelenggarakan desentralisasi. Indeks kemampuan rutin adalah pengukuran dari perspektif pembiayaan daerah. IKR dapat diukur dengan persentase PAD dibanding belanja rutin daerah. Dua rasio tersebut kemudian diklasifikasikan dalam pola hubungan sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang, atau sangat kurang (Putri, 2017).

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD didapat daerah melalui pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, serta bisa dijadikan indikator kemandirian daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah yang dimilikinya sehingga PAD dapat meningkat (Haji, 2015).

Penelitian oleh (Qomariyah, et.al., 2018) menemukan bahwa besaran PAD dapat dipengaruhi oleh pengeluaran daerah. Apabila pengeluaran daerah meningkat, maka

besaran PAD juga meningkat meskipun tidak signifikan. Pemerintahan daerah dibiayai oleh PAD dalam menciptakan barang modal, termasuk infrastruktur daerah sehingga variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar alokasi belanja modal. Dengan meningkatnya belanja modal terutama yang digunakan untuk mendanai pembangunan, maka dapat berpengaruh pada meningkatnya produktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Karenanya, besaran kontribusi PAD terhadap APBD seringkali dijadikan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

f. Belanja Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, segala jenis kewajiban daerah yang dapat menjadi pengurang kekayaan bersih daerah tersebut dalam suatu periode tahun anggaran disebut belanja daerah. Sedangkan PP Nomor 58 Tahun 2005 mengartikan belanja daerah sebagai segala jenis pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengakibatkan terjadinya pengurangan ekuitas dana lancar selama suatu periode tahun anggaran dan pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah. Besaran belanja suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan. Belanja daerah sendiri dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai urusan otonomi daerah.

Menurut teori Keynes, belanja publik yang dilakukan pemerintah diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam mendorong perekonomian apabila pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan berguna bagi kepentingan publik, contohnya seperti belanja yang ditujukan untuk pengadaan sarana prasarana yang tidak dipenuhi swasta.

Jenis belanja tersebut dapat memicu peningkatan produktivitas ekonomi dan mendorong investasi. Peningkatan investasi kemudian akan mendorong perekonomian yang semakin produktif dan berkembang sehingga dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan (Wahyudi, 2020).

g. Amalgamasi

Dalam teori pemerintahan daerah, terdapat konsep amalgamasi dalam menjelaskan pembentukan pemerintah daerah (Leemans, 1970). Amalgamasi terdiri dari tiga jenis yaitu: (a) merger merupakan meleburnya daerah otonom tanpa menimbulkan daerah otonom baru, merger juga dapat berupa penghapusan daerah otonomi dengan menjadikan satu kesatuan daerah otonom baru; (b) aneksasi adalah meleburnya sebagian wilayah daerah otonom dengan daerah otonom lain menjadi daerah otonomi baru atau satuan daerah tertentu tanpa melibatkan daerah otonom lain; (c) redivisi dapat timbul karena merger dan aneksasi. Residivis terjadi jika ada pembagian ulang antar

batas wilayah teritorial daerah otonom. Jika penarikan garis baru dilakukan di daerah otonom tingkat atas maka akan terjadi daerah otonom yang lebih kecil dan menjadi wilayah administratif di bawahnya.

Pemerintah sebagai elemen penyelenggara desentralisasi harus mempertimbangkan dengan matang pembentukan daerah otonom dan membantu pengelolaan agar maju. Pembentukan daerah tidak boleh dilakukan hanya dengan pertimbangan faktor politis dan sejarah saja tetapi harus mempertimbangkan kebermanfaatan bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi juga tetap menjaga keunikan nilai sosial budaya masyarakatnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan analisis data, digunakan Uji Mann-Whitney yang merupakan model statistik non-parametrik untuk membandingkan dua kelompok data tidak berpasangan berdasarkan nilai mean rank masing-masing kelompok. Mean rank adalah rata-rata dari nilai peringkat seluruh data pada masing-masing kelompok yang diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar berdasarkan peringkatnya secara keseluruhan.

Penggunaan model non-parametrik dalam penelitian ini dipilih karena berdasarkan hasil uji Kolmogorov smirnov, data penelitian tidak memenuhi asumsi berdistribusi normal dan tidak memiliki jumlah sampel yang sama pada masing-masing kelompok. Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini untuk diuji menggunakan Mann-Whitney test dirumuskan sebagai berikut.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Dimana  $\mu_1$  merupakan rata-rata peringkat kinerja ekonomi pada daerah induk dan  $\mu_2$  merupakan rata-rata peringkat kinerja ekonomi pada daerah otonomi baru. Apabila nilai signifikansi dari hasil pengujian Mann-Whitney test yang dilakukan dengan bantuan Software SPSS menunjukkan nilai yang lebih kecil dari taraf nyata sebesar 5%, maka keputusannya adalah tolak  $H_0$  atau disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata peringkat kinerja ekonomi daerah pada daerah otonomi baru dibandingkan dengan rata-rata peringkat kinerja ekonomi daerah pada daerah induk pasca dilakukannya pemekaran daerah. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka terima  $H_0$  atau disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mean rank kinerja ekonomi pada DOB dan Daerah Induk.

### a. Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti perbandingan kinerja ekonomi antara daerah otonom baru (DOB) dan daerah induk (DI) pasca pemekaran. Sampel daerah yang digunakan meliputi 13 daerah induk yang terdiri dari Kab. Banggai Kepulauan, Belu, Ciamis, Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Sula, Kutai Barat, Konawe, Kolaka, Lampung Barat, Manokwari, Mamuju, Musi Rawas, Morowali, dan 14 daerah otonomi baru yang terdiri dari Kab. Banggai Laut, Provinsi Kalimantan Utara, Konawe

Kepulauan, Kolaka Timur, Manokwari Selatan, Malaka, Kab. Musi Rawas Utara, Mahakam Ulu, Morowali Utara, Mamuju Tengah, Pulau Taliabu, Pesisir Barat, Pangandaran, Pegunungan Arfak. 27 sampel penelitian tersebut merupakan daerah yang terdampak dari pemekaran wilayah yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2013. Sampel penelitian menggunakan data tahun 2014-2018. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### b. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD sebagai upaya untuk membiayai pembangunan dan mendukung otonomi daerah dapat digambarkan pada tingkat kemampuan keuangan daerah yang dirumuskan dengan membandingkan PAD dengan total belanja daerah dikali 100%. Dalam penelitian ini digunakan index growth sehingga perkembangan tingkat kemampuan keuangan daerah (XSG) dirumuskan sebagai berikut:

$$XSG = \left( \frac{PAD_t}{\text{Total Belanja}_t} \times 100\% \right) - \left( \frac{PAD_{t-1}}{\text{Total Belanja}_{t-1}} \times 100\% \right)$$

#### c. Tingkat Kemandirian Keuangan

Berlakunya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemampuan ini dapat dilihat dari tingkat kemandirian fiskal daerah. Jika daerah memiliki independensi fiskal yang baik maka daerah dapat melakukan pembangunan dengan lebih baik. Tingkat kemandirian keuangan dirumuskan dengan melakukan perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah dikali seratus persen. Dalam penelitian ini digunakan index growth sehingga perkembangan tingkat kemandirian keuangan (XI1G) dirumuskan sebagai berikut:

$$XI1G = \left( \frac{PAD_t}{\text{Total Pendapatan}_t} \times 100\% \right) - \left( \frac{PAD_{t-1}}{\text{Total Pendapatan}_{t-1}} \times 100\% \right)$$

#### d. Tingkat Ketergantungan Keuangan

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat ditunjukkan melalui tingkat ketergantungan keuangan daerah melalui dana transfer dari pusat ke daerah. Tingkat ini didapat dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan pemerintah daerah dikali seratus persen. Dalam penelitian ini digunakan index growth, sehingga perkembangan tingkat ketergantungan keuangan (XI2G) dirumuskan sebagai berikut:

$$XI2G = \left( \frac{TKDD_t}{\text{Total Belanja}_t} \times 100\% \right) - \left( \frac{TKDD_{t-1}}{\text{Total Belanja}_{t-1}} \times 100\% \right) \text{Persentase Penduduk Miskin}$$

Persentase ini menggambarkan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Semakin tinggi persentase maka tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah juga tinggi. Untuk mengukur persentase ini didapat dengan rumus sebagai berikut:

$$P_o = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^n$$

Keterangan:

Po = Persentase penduduk miskin

- Z = Garis kemiskinan  
 Y1 = Pengeluaran perkapita penduduk miskin rata-rata  
 q = jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan  
 n = jumlah penduduk

Dalam penelitian ini digunakan index growth sehingga perubahan persentase penduduk miskin (XPG) dapat dirumuskan dalam rumus berikut:

$$\text{XPG} = \text{Persentase penduduk miskin}_t - \text{Persentase penduduk miskin}_{t-1}$$

Tahun	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Mean Rank DI	Hasil	Mean Rank DOB
2014	XSG	0.017	10.23	<	17.50
2015	XSG	0.369	12.58	<	15.32
2016	XSG	0.286	15.69	>	12.43
2017	XSG	0.560	13.08	<	14.86
2018	XSG	0.073	16.85	>	11.36

#### e. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB merefleksikan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. PDRB per kapita didapat dengan membagi PDRB harga konstan dengan jumlah penduduk. Indikator PDRB perkapita dapat digunakna untuk menilai apakah pembangunan perekonomian suatu wilayah sudah berhasil atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan index growth sehingga perkembangan PDRB perkapita (XEG) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{XEG} = \frac{\text{PDRB Perkapita}_t - \text{PDRB perkapita}_{t-1}}{\text{PDRB perkapita}_{t-1}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pertumbuhan Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil uji mann-whitney, diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan persentase penduduk miskin pada daerah induk dan daerah otonom baru. Hal tersebut ditunjukkan dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ . Perbedaan yang signifikan terjadi karena DOB mengalami pertumbuhan penduduk miskin yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah induknya pada tahun pertama pasca pemekaran, dibuktikan dari nilai mean rank kelompok DOB sebesar 20,43 jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok DI sebesar 7,08. Namun pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan penduduk miskin pada daerah induk dan daerah otonom baru yang ditunjukkan dari Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar  $0,000 > \alpha (0,05)$ . Meskipun demikian, pada tahun 2015, 2017, dan 2018, kelompok DOB masih mengalami pertumbuhan penduduk miskin yang lebih tinggi setiap tahunnya dibandingkan daerah induk, meskipun tidak signifikan.

Sementara hanya pada tahun 2017 DOB mengalami pertumbuhan penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan DI. Artinya, dalam lima tahun pasca

pemekaran, DOB cenderung mengalami pertumbuhan tingkat penduduk miskin lebih tinggi. Temuan tersebut juga dibuktikan oleh studi yang dilakukan oleh BAPPENAS pada tahun 2008 yang menemukan bahwa penduduk miskin terkonsentrasi pada DOB karena pemekaran daerah cenderung mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke DOB. Lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan daerah induk lebih tinggi dan DOB belum dapat mengejar ketertinggalan tersebut, meskipun dapat dikatakan kesejahteraan DOB dan daerah lain relative sama. Penelitian (Winarsi, et.al., 2020) menemukan hal serupa, dimana tingkat kemiskinan cenderung menurun pada DI pasca pemekaran, namun tidak dengan DOB. Menurut Salim (2019) tingkat kemiskinan pada daerah induk cenderung mengalami penurunan setelah adanya pemekaran. Penurunan tersebut dikaitkan dengan berkurangnya penduduk miskin ke kabupaten baru pecahan dari daerah induk, sehingga tingkat kemiskinan akan ikut mengalami penurunan.

Pada tahun 2014, DOB mengalami perkembangan tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dan signifikan dibandingkan daerah induknya. Hal tersebut ditunjukkan dari lebih besarnya nilai mean rank DOB dibandingkan DI dengan nilai 17,50 berbanding 10,23. Perbedaan yang signifikan dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < alpha (0,05). Namun secara berturut-turut pada 4 tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan tingkat kemampuan keuangan daerah pada DOB dan daerah induk.

#### b. Tingkat Kemandirian Daerah

**Tabel 1. Hasil Uji Mann-Whitney Perbandingan Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah antara DI dan DOB**

Tahun	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Mean Rank DI	Hasil	Mean Rank DOB
2014	XI1G	0.015	10.15	<	17.57
2015	XI1G	0.275	12.27	<	15.61
2016	XI1G	0.133	16.38	>	11.79
2017	XI1G	0.332	12.46	<	15.43
2018	XI1G	0.073	16.85	>	11.36

Sumber: Penulis, diolah

Pada tahun 2014, 2015, dan 2017, kelompok DOB mengalami perkembangan tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan kelompok DI, kemudian pada tahun 2016 dan 2018 menunjukkan pola sebaliknya, meskipun perbedaan yang terjadi antara kedua kelompok selama tahun 2015 hingga tahun 2018 tidak signifikan. Hasil pengujian yang menemukan bahwa daerah-daerah pada kelompok DOB mengalami pertumbuhan tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok DI. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pemekaran dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan percepatan pengelolaan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan porsi PAD (Salim, 2019).

Pada variabel pertumbuhan tingkat kemandirian daerah (XI1G), berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok DOB dan DI hanya pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang dibuktikan dari nilai Asymp.

Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari alpha (0.05). Pada tahun 2014, 2015, dan 2017, kelompok DOB mengalami pertumbuhan tingkat kemandirian daerah yang lebih baik dibandingkan kelompok DI. Sementara pada tahun 2016 dan 2018, DOB mengalami pertumbuhan tingkat kemandirian daerah yang lebih rendah. Artinya, kelompok DOB memiliki kecenderungan mengalami peningkatan kinerja kemandirian daerah yang lebih cepat dibandingkan kelompok DI. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitra, 2014) yang menemukan bahwa Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah hasil pemekaran memiliki rata-rata tingkat kemandirian daerah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasaman yang merupakan daerah induknya.

### c. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 2 variabel perkembangan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer (XI2G), ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok DOB dan DI pada tahun 2014, dimana kelompok daerah induk memiliki mean rank yang lebih besar dibandingkan kelompok DOB. Sementara pada tahun 2015 hingga 2018, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, kelompok DI memiliki kecenderungan mengalami kenaikan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang lebih tinggi dari daerah induk. Sementara pada tahun 2018, variabel XI2G antara kelompok DOB dan DI memiliki nilai mean rank yang sama.

**Tabel 2. Hasil Uji Mann-Whitney Perbandingan Perkembangan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah antara Kelompok DI dan DOB**

Tahun	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Mean Rank DI	Hasil	Mean Rank DOB
2014	XI2G	0.004	18.62	>	9.71
2015	XI2G	0.698	13.38	<	14.57
2016	XI2G	0.698	13.38	<	14.57
2017	XI2G	0.190	11.92	<	15.93
2018	XI2G	1.000	14.00	=	14.00

Sumber: Penulis, diolah

Pada variabel perkembangan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer (XI2G), ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok DOB dan DI pada tahun 2014, dimana kelompok daerah induk memiliki mean rank yang lebih besar dibandingkan kelompok DOB. Sementara pada tahun 2015 hingga 2018, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, kelompok DI memiliki kecenderungan mengalami kenaikan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang lebih tinggi dari daerah induk.

Sementara pada tahun 2018, variabel XI2G antara kelompok DOB dan DI memiliki nilai mean rank yang sama.

Hasil tersebut tidak sejalan dengan studi evaluasi pemekaran kabupaten di Indonesia selama tahun 2000-2005 yang dilakukan oleh BAPPENAS (2008), dimana ditemukan bahwa secara umum kinerja keuangan DOB lebih rendah dari DI. Selama lima tahun kinerja keuangan DI cenderung meningkat sementara DOB cenderung konstan. Akibatnya, DOB memiliki ketergantungan fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induknya. Menurut Maulana (2020) kinerja keuangan DOB cenderung konstan dan membuat DOB memiliki ketergantungan fiskal lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Adanya pemekaran juga menyebabkan ketergantungan yang lebih besar di daerah pemekaran.

Haji (2015) berpendapat bahwa ketergantungan pemerintah daerah pasca pemekaran akan meningkat dalam jangka panjang sebab PAD tidak menjadi prioritas dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dikarenakan belum memadainya infrastruktur publik dan kondisi ekonomi masyarakat.

#### d. PDRB Perkapita

Berdasarkan Tabel 3 Pola temuan yang berbeda terjadi pada variabel pertumbuhan PDRB Perkapita, dimana perbedaan yang signifikan terjadi pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan PDRB Perkapita pada kelompok DOB dibandingkan daerah induknya yang ditunjukkan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > alpha (0,05).

Tabel 3. Hasil Uji Mann-Whitney Perbandingan Pertumbuhan PDRB Perkapita Antara Kelompok DI dan DOB

Tahun	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Mean Rank DI	Hasil	Mean Rank DOB
2014	XEG	0.512	15.04	>	13.04
2015	XEG	1.000	13.50	=	13.50
2016	XEG	0.049	17.12	>	11.11
2017	XEG	0.512	15.04	>	13.04
2018	XEG	0.645	13.27	<	14.68

Sumber: Penulis, diolah

DOB memiliki kecenderungan mengalami pertumbuhan PDRB perkapita yang lebih kecil dibandingkan DI yang ditunjukkan dari lebih besarnya nilai mean rank mann-whitney pada kelompok DI, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2014, 2016, dan 2017. Sementara pada tahun 2015, tidak ditemukan adanya perbedaan antara nilai mean rank kedua kelompok. Kemudian pada tahun 2018, DOB justru mengalami pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dari daerah induk.

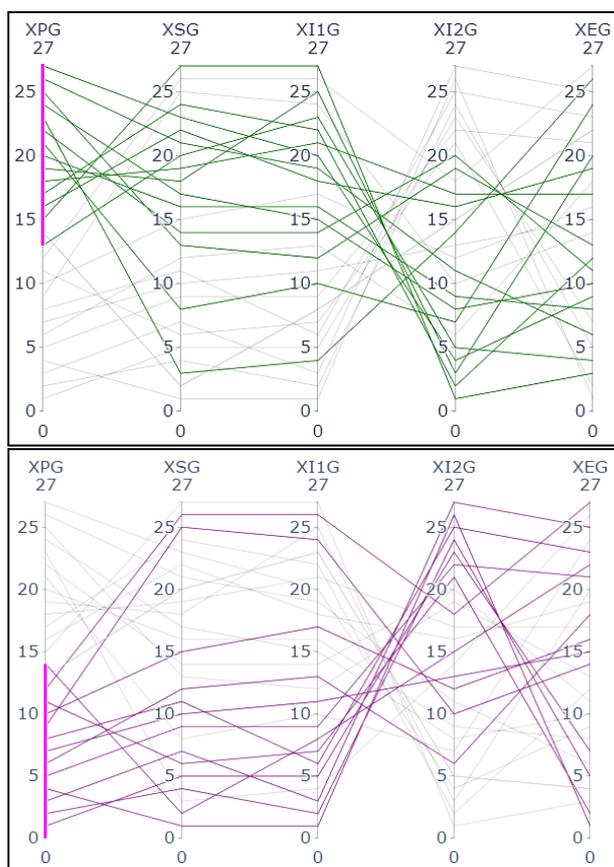
Salah satu parameter yang seringkali digunakan untuk mengukur produktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka makin leluasa penduduk tersebut memenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu, PDRB perkapita suatu daerah dapat digunakan

untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa kelompok DOB memiliki kecenderungan mengalami pertumbuhan PDRB perkapita yang lebih rendah dibandingkan kelompok DI. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemekaran daerah yang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.

**e. Perbandingan Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah Antara DI dan DOB**

Berdasarkan perbandingan mean rank antara kelompok daerah otonom baru (DOB) dan daerah induk (DI) pada tahun 2014-2018, hanya pada satu tahun awal pasca pemekaran yaitu tahun 2014 ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja ekonomi daerah pada dua kelompok. Perbedaan yang dimaksud terjadi pada 4 variabel penelitian, meliputi variabel pertumbuhan penduduk miskin, rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, dan rasio ketergantungan daerah, yang ditunjukkan dari  $Asymp.Sig. (2-tailed) < \alpha (0,05)$ . Sementara pada variabel perkembangan PDRB Perkapita, pada tahun 2014 tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara daerah induk dan DOB dikarenakan nilai  $Asymp.Sig. (2-tailed) < \alpha (0,05)$ .

Gambar 1. Parallel Coordinate Plot Perbandingan Mann-Whitney Rank Kinerja Ekonomi Daerah Antara Kelompok DI dan DOB pada Tahun 2014



Sumber : Penulis, diolah

Terlihat pada gambar 1, pada tahun 2014 daerah-daerah pada kelompok DOB sebagaimana ditunjukkan grafik berwarna hijau berada dalam peringkat mann-whitney urutan 15 hingga 27 atau termasuk dalam 13 peringkat terbawah pada variabel tingkat kemiskinan (XPG), dengan pengecualian Kabupaten Musi Rawas Utara yang menduduki peringkat ke-13. Sementara kelompok DI yang ditunjukkan grafik berwarna ungu menduduki 12 peringkat mann-whitney teratas pada variabel XPG, dengan pengecualian Kabupaten Belu yang menduduki peringkat ke-14.

Semakin bawah peringkat mann-whitney suatu daerah, maka tingkat pertumbuhan penduduk miskin pada daerah tersebut semakin besar. Sebaliknya, semakin atas peringkat mann-whitney suatu daerah, maka daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk miskin yang lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil uji mann-whitney pada tabel 4, dimana mean rank kelompok DOB pada variabel XPG memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan mean rank kelompok DI, yaitu secara berurutan sebesar 20,43 dan 7,08.

Sementara pada tingkat kemampuan keuangan daerah (XSG), sebanyak 12 dari 14 daerah pada kelompok DOB menduduki peringkat mann-whitney terbawah sementara 2 daerah sisanya yaitu Kab. Morowali Utara dan Kab. Pesisir Barat menduduki peringkat di atas batas median sebesar 13,5. Sebaliknya, kelompok daerah induk sebanyak 10 dari 13 daerah sampel menduduki peringkat mann-whitney teratas sementara 3 daerah sisanya meliputi Kab. Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali dan Kab. Konawe berada pada peringkat mann-whitney di bawah batas median.

Hal yang hampir serupa terjadi pada variabel tingkat kemandirian daerah (XI1G), dimana sebanyak 11 dari 14 daerah pada kelompok DOB menduduki mann-whitney rank terbawah dengan pengecualian Kab. Morowali Utara, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Banggai Laut yang berada pada peringkat di atas nilai median mann-whitney rank. Sementara pada kelompok daerah induk, terdapat 10 dari 13 daerah sampel menduduki peringkat mann-whitney di atas batas median dengan pengecualian 3 daerah meliputi Kab. Morowali, Kab. Banggai Kepulauan, dan Kab. Konawe.

Pada variabel perkembangan tingkat ketergantungan keuangan daerah (XI2G), sebanyak 9 dari 14 daerah pada kelompok DOB menduduki peringkat teratas, sementara 5 daerah sisanya menduduki peringkat di bawah batas median. Jika nilai peringkat seluruh daerah pada kelompok DOB dirata-ratakan, maka menghasilkan nilai mean rank yang lebih kecil dibandingkan kelompok DI yang sebanyak 10 daerah di dalamnya menduduki peringkat ketergantungan keuangan daerah terbawah dengan pengecualian 3 daerah yang menduduki peringkat di atas batas median. Dengan kata lain, pada tahun 2014 yang dapat dikatakan sebagai tahun pertama pasca pemekaran, kelompok DOB memiliki kecenderungan mengalami perkembangan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah induk.

Pada tahun 2014, antara kelompok DI dan DOB tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada variabel pertumbuhan PDRB perkapita. Artinya, terdapat daerah pada kelompok DOB yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita

lebih tinggi dan ada pula yang lebih rendah dibandingkan daerah induknya. Hasil yang sama juga terjadi pada tahun 2015, 2017, dan 2018 dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari alpha sebesar 5%. Namun pada tahun 2016, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok DOB dan DI, dimana pada tahun tersebut kelompok DOB memiliki mean rank yang lebih tinggi dibandingkan DI. Dengan kata lain, daerah-daerah pada kelompok DOB mengalami pertumbuhan PDRB perkapita yang tinggi dan signifikan dibandingkan kelompok DI pada tahun 2016.

## KESIMPULAN

Pada tahun pertama pasca pemekaran, kelompok DOB memiliki kecenderungan mengalami perkembangan tingkat kemiskinan, tingkat kemampuan keuangan, dan tingkat kemandirian daerah yang lebih tinggi dari kelompok daerah induk. Sedangkan pada variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah, kelompok DI mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan DOB. Lain halnya dengan variabel pertumbuhan PDRB perkapita, tidak ditemukan adanya pola yang menunjukkan salah satu kelompok memiliki kinerja lebih baik dari kelompok lainnya pada tahun 2014, namun ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok pada tahun 2016.

Pada tahun 2015-2018, berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dari perkembangan kinerja ekonomi antara kedua kelompok pada hampir setiap variabel, kecuali pertumbuhan PDRB pada tahun 2016. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun pasca pemekaran daerah-daerah pada kelompok DOB cenderung mengalami perkembangan tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah, dan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Akan tetapi, DOB juga mengalami pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Meskipun demikian, perbedaan yang dimaksud tidak signifikan pada empat dari lima tahun sampel penelitian yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amroni, Y. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Belley, S. (2012). "Amalgamation (or Merger)," in L. Côté and J.-F. Savard (eds.). *Encyclopedic Dictionary of Public Administration*, [online], [www.dictionnaire.enap.ca](http://www.dictionnaire.enap.ca).
- Fitra, H. (2014). Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran. *Jurnal WRA*, 2(1), 369-386. Retrieved from [ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/download/6150/4774](http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/download/6150/4774)
- Harsasto, P. (2020). Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 149-162.

- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785-787. Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Kurniati, P. S. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Ilmu Politik dan Komunikasi*, 3(1), 3. Retrieved from <https://repository.unikom.ac.id/30676/1/1-jipsi-unikom.pdf>
- Leemans, A. F. (1970). *Changing Patterns of Local Government*. The Hague, IULA.
- Maulana, A. (2020). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(1), 35-64.
- Nasional, B. P. P. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*. Jakarta: UNDP.
- Pramidaya Haji, A. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Wilayah Provinsi (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara). *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, 1(2), 129-146.
- Putri, H. E. (2017). Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 132-146. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarsono, D. S. (2018). Dampak Transfer Fiskal Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 45-67.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
- Salim, M. N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan dan Ekonomi Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Pemekaran. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(2), 436-451.
- Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 45-54.
- Sekretaris Kabinet. (2020). Wapres: Pemerintah Masih Lakukan Moratorium Pemekaran Daerah. Retrieved from <https://setkab.go.id/wapres-pemerintah-masih-lakukan-moratorium-pemekaran-daerah/>
- Sulasmu, & Siregar, M. I. (2020). Analisis Ketimpangan Wilayah Dan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Induk Dan Pemekarannya Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 5(2), 109-117. Retrieved from <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/15202>

- Sutojo, A. (2015). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Empirik di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 4(4), 1-15.
- Syarifuddin, S., & Damayanti, R. A. (2015). Good governance and fiscal capacity in regional expansion: A holistic analysis of qualitative perspective. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 18(1), 15.
- Tavares, A. F. (2018). Municipal amalgamations and their effects: A literature review. *Miscellanea Geographica*, 22(1), 5-15.
- Trikurniasih, E., Handayani, R., Santoso, A., & Soleh, A. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 159.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 103-113.
- Winarsi, S., Prihatiningtyas, W., & Fitriana, Z. M. (2020). Sustainable Regional Expansion Model in Order to Increase the Regional Potency: Case Study in Indonesia, 179-186.
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 182-191.